

**PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KEANDALAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI**

GITA SILVIA MARDA
Email : gitagita64@gmail.com
Contact Person: 085284489651

Anggota :
Raja Adri Satriawan, SE, MA, Ak
Supriono, SE, M.Si, Ak

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi UR

ABSTRACT

This study aims to examine and obtain empirical evidence about the factors that affect the reliability of financial reporting local government, specifically her at Dumai City Government. This research is motivated by the fact that the government financial reporting should provide information which is reliable in assessing accountability and decision-making parties. Variables to be tested in this study were, among others, the quality of human resources, the utilization of information technology and financial control systems area (as independent variables) to the reliability of financial reporting (as dependent variable).

The data in this study is primary data obtained from questionnaires distributed directly to the respondents. Data collected from 105 respondents who work in finance / administration on regional work units (SKPD) in the city of Dumai. This hypothesis was tested by multiple linear regression using partial hypothesis test (ujit-t).

The test results showed that the quality of human resources and financial controls areas significant positive effect partially on local government financial reporting reliability of Dumai. While Information Technology berpengaruh not to Keandalan Financial Reporting for maximum utilization of Information Technology has not used in Dumai City government institutions.

Keywords: Human Resources, Information Technology, Regional Financial Supervision and Financial Reporting Reliability Government

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai teori agency yang menyatakan bahwa adanya kepentingan antara agen dengan principle. Dengan adanya kepentingan tersebut maka akan muncul masalah keagenan diantara mereka. Dalam hal ini pemerintah merupakan pihak yang bertanggungjawab atas akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta

pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu : 1) pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), dan 2) pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal).

Akuntabilitas dalam konteks institusi pemerintah didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan pimpinan instansi pemerintah terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. *Governmental Accounting Standard Board* (1999) dalam *Concepts Statement* No. 1 tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan dipemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Fenomena pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai informasi yang ada, ternyata didalam laporan keuangan Pemerintah Daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dalam laporan keuangan pemerintah kota Dumai.

Permasalahan lain terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain (1) Proses penganggaran tidak sesuai ketentuan dan terdapat kesalahan penganggaran pada beberapa SKPD; (2) Nilai Investasi Non Permanen sebesar Rp6.576.760.301,00 tidak dapat tertagih; (3) Terdapat perjalanan dinas luar daerah dan luar provinsi pada tiga SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang berindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp94.042.600,00.; (4) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial sebesar Rp1.025.000.000,00 belum disampaikan oleh penerima bantuan.

Harapan BPK RI terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2011 tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Dumai sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh Walikota kepada BPK RI.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan, diantaranya keandalan. Mengingat bahwa keandalan merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007). Disinilah peran aparatur sebagai sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik untuk mengelola keuangan daerah.

Penelitian sebelumnya tentang pemanfaatan teknologi informasi yang pernah dilakukan. Penelitian Andriani (2010) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Zetra (2009) meneliti tentang kesiapan sarana dan prasarana pendukung seperti komputer baik *hardware* maupun *software*, bagi aparatur daerah dalam menyampaikan LKPD masih kurang. Banyak SKPD yang hanya memiliki satu unit komputer untuk semua urusan. Padahal untuk menjalankan sistem informasi keuangan secara efektif, idealnya setiap SKPD memiliki komputer khusus untuk penatausahaan keuangan. Hal tersebut mungkin memiliki pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang andal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka pembinaan aparat pengawas intern pemerintah harus dilakukan secara terus menerus (*series of actions and on going basis*).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat kembali bagaimana Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan variabel, Objek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Propinsi Riau berbeda dengan Indriasari Satuan Kerja Perangkat Kota Pontianak, sedangkan peneliti ini menambahkan variabel Pengawasan dalam Pelaporan Keuangan Daerah di Kota Dumai.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah pokok yang diuji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
3. Pengaruh Pengawasan Keuangan daerah terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

II. METODE PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kota Dumai. Sampel diambil dari responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Dumai yang berjumlah 35 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 105 responden.

2.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008). Kuisisioner tersebut akan diberikan kepada responden yang bekerja pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Dumai.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisikan pertanyaan kepada instansi terkait melalui pos dan jika belum terpenuhi penulis akan mencoba untuk meninjau secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden yaitu pegawai yang bekerja pada SKPD Pemko Dumai dibagian keuangan/tata usaha dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini sangat berguna untuk mendukung landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pencarian di internet dan instansi terkait serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2.4 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.4.1 Keandalan

Keandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005). Konstruk Nilai informasi Keandalan dapat diukur dengan indikator :

a. Kewajaran

merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa transaksi serta peristiwa lainnya yang disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.

b. Kelengkapann Unsur Laporan Keuangan

Merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji kebenarannya, baik metodologi maupun bukti-bukti transaksi.

c. Generalisasi

Merupakan indikator untuk menggambarkan bahwa informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

2.4.2 Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi/kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai sebuah implementasi kebijakan publik dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi.

Variabel sumber daya manusia diukur dengan instrumen yang dibuat oleh Xu, *et al.* (2003) dalam Sukmaningrum (2012) terdapat empat indikator, yaitu: (1) Pemahaman terhadap peraturan dan standar, (2) Interaksi dengan sistem, (3) Kontrol terhadap SDM, (4) Pendidikan dan training.

2.4.3 Teknologi Informasi (TI)

Teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari computer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000). Beberapa indikator pada teknologi informasi dapat dilihat dengan adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Hamzah, 2009).

2.4.4 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengukuran variable ini menggunakan instrument kuesioner, dengan model skala Likers Lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

2.5 Metode Analisis Data

2.5.1 Uji validitas dan Reliabilitas

Uji validitas menggunakan analisis faktor dengan tujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya butir-butir pertanyaan untuk masing-masing variabel atau untuk mengetahui validitas konstruk (Chenhall & Morris, 1986 dalam Indriasari, 2008). Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.60 (Nunnally, 1978).

2.5.2 Analisis Regresi Berganda

Metode Analisis Berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur hubungan antara variable independen (Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI), dan (Pengawasan) dengan variable dependen (Keandalan Pelaporan Keuangan). Untuk menguji hipotesis diatas, digunakan model sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

a = konstanta

b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi

X_1 = Sumber Daya Manusia

X_2 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

X_3 = Pengawasan Keuangan Daerah

Y = Keandalan Pelaporan Keuangan

E = Standar Error

2.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai kontribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2005).

2.5.4 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapatnya hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain.

2.5.5 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.

2.5.6 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam spesifikasi model regresi, misalnya perubahan struktur ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan tingkat keakuratan data. Dengan kata lain, heterokedastisitas terjadi jika residual tidak memiliki varians yang konstan (Pratisto 2004:149 dalam Ranti Oktari 2011).

2.5.7 Pengujian Hipotesis

Setelah mendapat model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

2.5.8 Uji Koefisien Regresi Parsial (uji-t)

Uji Koefisien Regresi Parsial (uji-t) dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

2.5.9 Uji Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan penelitian terdahulu maka dapat diajukan hipotesis berikut :

- H1 : Kualitas Sumber Daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- H2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
- H3 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Objek Penelitian

3.1.1 Demografi Responden Kuesioner

Penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada SKPD Kota Dumai Pensampelan atas responden dilakukan secara *purposive*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Dumai yang berjumlah 35 SKPD. Dari setiap SKPD akan diambil 3 responden dengan kriteria Kasubag keuangan, bendahara dan staff keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 105 responden.

Tabel 3.1: Distribusi Kuisisioner

Keterangan	Jumlah	%
Kuisisioner yang disebar	105	100.00%
Kuisisioner yang kembali	90	85.71%
Kuisisioner yang tidak kembali	15	14.29%
Kuisisioner yang dapat diolah	90	85.71%

Sumber : Data olahan, 2013

Demografi responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur, pendidikan, jabatan, lama menjabat dan masa kerja dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2 Demografi Responden

Demografi Responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	73	81.11%
Wanita	17	18.89%
Total	90	100.00%
Umur		
20-30	7	7.78%
31-40	49	54.44%
41-50	20	22.22%
51-60	14	15.56%
Total	90	100.00%
Tingkat Pendidikan		
SMA	6	6.67%
D3	19	21.11%
S1	55	61.11%
S2	10	11.11%
Total	90	100.00%
Posisi Jabatan		

Kaubag/Subbag Keuangan	12	13.33%
Bendahara	46	51.11%
Staff Keuangan	32	35.56%
Total	90	100.00%
Lama Menjabat (Tahun)		
1-5	45	50.00%
6-10	25	27.78%
11-14	15	16.67%
15-20	5	5.56%
Total	90	100.00%
Masa Kerja (tahun)		
1-10	25	27.78%
11-20	41	45.56%
21-30	15	16.67%
> 30	9	10.00%
Total	90	100.00%

Sumber : Data olahan, 2013

3.2 Hasil Pengujian dan Analisis Data

3.2.1 Analisis Data dan Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 3.3 : Descriptive Statistic

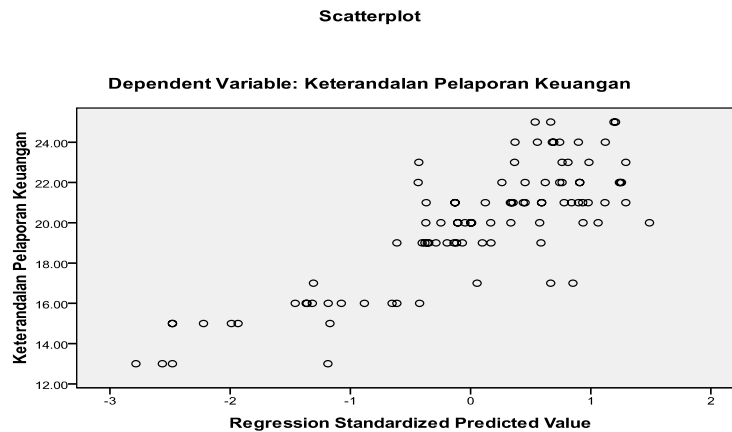
Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keandalan Pelaporan Keuangan	90	7.00	35.00	28.7905	3.69432
Sumber Daya Manusia	90	12.00	82.00	39.8857	7.48243
Pemanfaatan Teknologi Informasi	90	8.00	86.00	32.9143	7.19390
Pengawasan Keuangan Daerah	90	7.00	35.00	28.7524	3.88731
Valid N (listwise)	90				

Dari tabel 3.3 untuk variabel Keandalan Pelaporan Keuangan dapat dilihat bahwa nilai maksimum sebesar 35 dan minimum 7, kemudian nilai rata-rata untuk variabel Keandalan Pelaporan Keuangan adalah 28,7905 dengan standar deviasi 3,69342. Untuk variabel Sumber Daya Manusia memiliki nilai maksimum sebesar 82 dan minimum 12, kemudian nilai rata-rata 39,8857 dengan standar deviasi 7,48243. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi nilai maksimum sebesar 86 dan minimum 8, kemudian memiliki nilai rata-rata 32,9143 dengan standar deviasi 7,19930. Variabel Pengawasan Keuangan Daerah yang juga sebagai memiliki nilai maksimum sebesar 35 dan minimum 7, kemudian nilai rata-rata 28,7524 dengan standar deviasi 3,88731.

3.2.2 Hasil Uji validitas dan Reliabilitas

Dalam penelitian ini uji validitas data dilakukan dengan analisis Korelasi Pearson melalui aplikasi SPSS 17. Uji validitas dilakukan dengan melihat r_{tabel} . Nilai r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 90, maka didapat r tabel sebesar 0,30. Nilai r_{tabel} yang diperoleh dibandingkan dengan nilai r_{hitung} untuk menguji validitas dari data yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Hasil uji validitas untuk instrumen Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan daerah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

3.2.3 Hasil Uji Normalitas Data



Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa untuk variabel dalam penelitian ini titik menyebar disekitar garis diagonal. Dengan demikian berarti data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

3.2.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3.4 : Tabel nilai VIF dan Tolerance

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sumber Daya Manusia	.707	1.414
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.736	1.359
Pengawasan Keuangan Daerah	.649	1.541

a. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan

Sumber: Data Olahan, 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, dari semua variabel tersebut semua nilai Toleransi berada diatas atau > 0.1 dan nilai VIF dibawah atau < 10 . Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

3.2.5 Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Watson. Menurut Yusbar (2010) batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 3.5 : Pengujian Autokorelasi

Model Summary^p

Model	Durbin-Watson
1	1.603

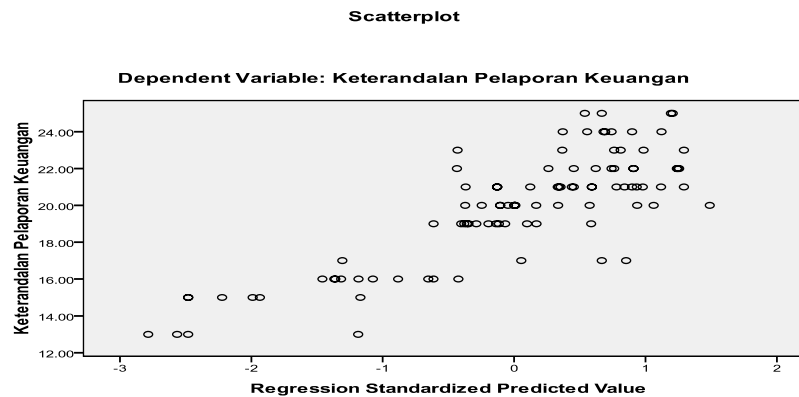
a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan

Sumber : Pengolahan Data SPSS

Hasil uji Durbin Watson menunjukkan angka 1,603 untuk dependen berarti Durbin Watson berada antara -2 sampai dengan +2. dengan demikian tidak ada autokorelasi dan data menunjukkan layak untuk diteliti.

3.2.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

3.2.7 Hasil Uji Hipotesis dan Pembahasan

Pengujian hipotesis untuk setiap variabel dilakukan dengan pengujian variabel secara parsial. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% dengan pengujian dua arah (*two tails test*), dan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, hal ini berarti variabel independen secara parsial/individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Dalam penelitian ini, data yang didapat akan diolah dengan model regresi linier berganda (*multiple regression*). Metode regresi dapat digunakan untuk memperlihatkan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Setelah mendapatkan model penelitian yang baik, maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Tabel berikut ini akan memperlihatkan hasil dari perhitungan untuk analisis regresi.

Tabel 3.6 : Persamaan Regresi Berganda

variabel Independen	Keandalan Pelaporan Keuangan		
	Beta	T	Sig
Konstanta	6.749		
Sumber Daya Manusia	.078	2.142	.035
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.005	.124	.902
Pengawasan Keuangan Daerah	.654	8.979	.000

Sumber: Data olahan

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 6.749 + 0.078X_1 + 0.005X_2 + 0.654X_3$$

Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi dari β_1 , β_2 , dan β_3 , bernilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan pada variabel terikatnya. Hal ini dimaksudkan apabila masing-masing variabel ditingkatkan peranannya secara keseluruhan maupun tiap masing-masing faktor akan meningkat. Dimana :

- a. Nilai a = 6.749 menunjukkan bahwa jika variabel faktor sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah 0 (nol) maka keandalan pelaporan keuangan akan penurunan sebesar 6.749

- b. Pengaruh sumber daya manusia terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan adalah negatif, dimana nilai (β_1) adalah = 0.078 artinya apabila Reputasi Auditor dinaikan 1% maka Keandalan Pelaporan Keuangan akan mengalami penurunan sebesar 7.8% dimana Keandalan Pelaporan Keuangan dianggap konstan.
- c. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan adalah negatif, dimana nilai (β_2) adalah = 0.005 artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi dinaikan 0.5% maka Keandalan Pelaporan Keuangan akan mengalami penurunan sebesar 16% dimana Keandalan Pelaporan Keuangan dianggap konstan.
- d. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan adalah negatif, dimana nilai (β_3) adalah = 0.654 artinya apabila pengawasan keuangan daerah dinaikan 1% maka Keandalan Pelaporan Keuangan akan meningkat sebesar 65.40% dimana Keandalan Pelaporan Keuangan dianggap konstan.

3.2.8 Hasil Pengujian Secara Parsial

3.2.8.1 Hasil Pengujian Hipotesis Satu (X1)

Hipotesis yang pertama diajukan adalah

Ho : Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Dumai

H1 : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Dumai

Jika nilai t hitung > t tabel dan p-value (sign) < dari 0,05 maka H_{a1} diterima, sebaliknya apabila t hitung < t tabel p value (sign) > 0,05 maka H_{a1} ditolak.

Dalam penelitian ini, nilai t hitung sebesar 2.142 dan t table sebesar 1.960 dan p value (sign) 0,008 yang artinya lebih besar dari 0,35. Dengan demikian, hasil penelitian ini berhasil menerima hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia kerja berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan.

Penelitian mengenai kesiapan sumber daya manusia subbagian akuntansi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan daerah pernah dilakukan oleh Alimbudiono dan Fidelis (2004) dan Dinata (2004). Temuan empiris dari penelitian mereka menunjukkan masih minimnya pegawai berlatar pendidikan akuntansi, belum jelasnya job description, dan kurangnya dilaksanakannya pelatihan-pelatihan untuk menjamin fungsi akuntansi berjalan dengan baik pada Pemerintah daerah tersebut. Selain itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Zetra (2009) ditemukan bahwa masih sulit bagi aparatur di daerah untuk menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel, tepat waktu, dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khususnya keahlian bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman staf terhadap teknologi informasi juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

3.2.8.2 Hasil Pengujian Hipotesis Dua (X2)

Hipotesis kedua yang diajukan adalah

Ho : Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Dumai

H2 : Teknologi Informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Dumai

Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan p -value (sign) $<$ dari 0,05 maka H_{a2} diterima, sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel p value (sign) $>$ 0,05 maka H_{a2} ditolak. Dalam penelitian ini, nilai t hitung sebesar 0.124 dan t table sebesar 1.960 dan p value (sign) 0,902 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.

Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik sudah pernah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008). Uraian dan temuan empiris mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, multiprocessing.

3.2.8.3 Hasil Pengujian Hipotesis Tiga (X3)

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah

H_0 : Pengawasan Keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Dumai

H_3 : Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kab. Kampar

Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan p -value (sign) $<$ dari 0,05 maka H_{a3} diterima, sebaliknya apabila t hitung $<$ t tabel p value (sign) $>$ 0,05 maka H_{a3} ditolak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Dalam penelitian ini, nilai t hitung sebesar 8.979 dan t table sebesar 1.960 dan p value (sign) 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan.

Salah satu fungsi pengawasan adalah pengambilan tindakan korektif, yaitu apabila ditemukan adanya penyimpangan, kekeliruan, serta pemborosan dapat segera diperbaiki, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi valid dan relevan Tuasikal (2007). Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Di dalam prosedur pengawasan, mencakup pula mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah dapat disampaikan dengan andal.

3.2.9 Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengistemasi nilai variabel dependen. Hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 :Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.784 ^a	.615	.604	2.32512	1.603

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Keandalan Pelaporan Keuangan

Sumber : Data Olahan, 2013

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0.615. Hal ini menunjukkan bahwa variable Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Kerja, memberikan pengaruh sebesar 61.50% terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan sebesar 39.50% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini di diterima
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan, artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak..
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.
4. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0.615. Hal ini menunjukkan bahwa variable Pengawasan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia Kerja, memberikan pengaruh sebesar 61.50% terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan sebesar 39.50% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

5.2 Saran

1. Diharapkan SKPD – SKPD terkait memperhatikan variable Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, karena terbukti memberikan pengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan.
2. Diharapkan SKPD – SKPD dikota Dumai meningkatkan Keandalan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi agar dapat mendukung Pelaporan Keuangan diSKPDnya.
3. Penelitian ini hanya mengambil 3 variabel. Oleh karena itu, perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30.
- Andriani Wiwik, (2010). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Skripsi. Politeknik Negri Padang
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*. Skripsi. Universitas Diponegoro

- Azhar.2007. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada pemerintah kota banda Aceh.Tesis. Universita Sumatra Utara.
- Dinata, Anton Mulhar. 2004. *Tinjauan Atas Kesiapan SDM pada Instansi Pemerintah Kota Palembang dalam Penerapan Akuntansi Daerah Menuju Terciptanya Good Governance di Era Otonomi Daerah*. Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya.
- Dwiyanti,Rini.2010.*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuanga pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada bursa efek indonesia*.Skripsi,Universitas Diponegoro:semarang
- Habibi,Hara.2010.*Pengaruh akuntabilitas keuangan,pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah(AKIP)*. Skripsi , Universitas Riau; Pekanbaru
- Hamzah, Ardi 2007, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*, Koferensi Penelitian, Jatim..
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan IV Penerbit UNDIP.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. *Concepts Statement No. 1: Objectives of Financial Reporting in Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement and Management Discussion and Analysis for State and Local Government*. Norwalk.
- Indriasari Desi dan Nahartyo, Bambang 2008.*Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*.SNA XI. Pontianak.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2006. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen (Ed. 1)*. Yogyakarta. BPF
- Lembaga Administrasi Negara (LAN),1999.*Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- LAN, BPKP. 2000. *Pengukuran kinerja instansi pemerintah*, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1, Hal. 1-17.
- Mike, indah. 2011. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Penyampaiaan Informasi Dalam Laporan Keuangan*. Universitas Gadjah Mada.
- Mustafa, Santiaji, Sutrisno dan Rosidi. 2011. *Anailisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pada SKPD pemerintah Daerah Kota Kendari*. Universitas Haluoleo, Kendari. E-Library Universitas Brawijaya Fakultas Accounting Science Master Program.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
-----, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
-----, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
-----, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian pemerintah

- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penatausahaan Daerah.
- Rosalin, Faristina. 2011. *faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan dan timeliness pelaporan keuangan badan layanan umum (studi pada BLU di kota Semarang)*. skripsi, Universitas Diponegoro; Semarang
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York.
- Stanbury, W.T., 2003, "Accountability to Citizens in the Westminster Model of Government: More Myth Than Reality", Fraser Institute Digital Publication, Canada.
- Sugijanto. 2002. *Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. Lintasan Ekonomi*. Volume XIX Nomor 1. Hal. 50-66.
- Tuasikal, A. 2007. "Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Sektor Publik*, Vol.08 No.01, pp.1466-148
- Setiawan wahyu, 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang
- Warisno, 2009. "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi", Tesis, Universitas Sumatera Utara.
- Winidyaningrum dan Rahmawati, (2010). *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia Terhadap Ketepatanwaktuan Dan Keterandalan Pelaporan Keuangan*. SNA XIII. Purwokerto.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, dan Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Informasi Systems: Essential Concepts and Application*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. Inc.
- Zetra, (2009). *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.